

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN POLITIK

KABUPATEN BANYUWANGI

Bab II ini menjelaskan empat hal yakni (1) Profil Kabupaten Banyuwangi (1) Profil Pasangan Calon Kepala Daerah (3) Peta Politik Kabupaten Banyuwangi (4) Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banyuwangi

2.1. Profil Kabupaten Banyuwangi

2.1.1. Kondisi Geografis

Luas wilayah kabupaten Banyuwangi adalah 5.781,50 km. Kabupaten Banyuwangi merupakan kawasan hutan karena termasuk wilayah yang lebih luas dari wilayah lainya. Terdiri dari 183.396,34 ha atau sekitar 31.61%. Luas lahan sawah sekitar 66.151 ha atau 11,44%. Perkebunan seluas kurang lebih 81.143,63 ha atau 14,11%. Sedangkan luas yang digunakan sebagai kawasan pemukiman mencapai kurang lebih 117.454,11 ha atau 11,04%. Garis pantai Kabupaten Banyuwangi kurang lebih 175,8 km dan memiliki 13 Pulau. Seluruh wilayah tersebut sangat bermanfaat bagi kemajuan ekonomi masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Secara administratif Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 kecamatan dan 28 kelurahan yang terbagi dalam 184 desa.

Sedangkan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi terletak di sebelah utara Kabupaten Situbondo, sebelah timur Bali dan Selat Bali. Berbatasan dengan Samudera Hindia di selatan dan Jember dan Bondowoso di barat. Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa, terdiri dari dataran tinggi berbentuk pegunungan yang menghasilkan hasil perkebunan dan dataran rendah dengan beragam potensi hasil pertanian.

Di sekitar garis pantai yang memanjang dari utara ke selatan merupakan kawasan yang menghasilkan keanekaragaman hayati laut. Pada tahun 2020, Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi mencapai 1.754.719, dengan jumlah penduduk perempuan 876.118 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki 878.591 jiwa, dengan sex ratio 100,18%. Dilihat dari situasi sosial masyarakat Kabupaten Banyuwangi, mata pencaharian yang berubah pasca alih fungsi lahan dan mata pencaharian sebagian besar adalah petani , karena banyak dari mereka yang sudah memiliki lahan pertanian pengrajin rotan , dan bagi masyarakat yang dekat dengan air laut sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan pengepul ikan. (Bappeda Kabupaten Banyuwangi, 2016).

2.1.2. Kondisi Demografi atau Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 mencapai 1.708.114 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,17. Jika dibandingkan dengan sensus sebelumnya, jumlah penduduk Banyuwangi terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun dari tahun 2010 hingga 2020, jumlah penduduk Banyuwangi mengalami penambahan mencapai 151.036 jiwa atau dengan rata-rata 15.103 setiap tahun. Kabupaten Banyuwangi bisa dikatakan masih dalam masa “bonus demografi” hal ini dikarenakan sebanyak 70,49 persen penduduknya masih berada di usia produktif yaitu (15-64 tahun). Namun disisi lain, seiring angka harapan hidup yang semakin meningkat, persentase penduduk usia lanjut juga akan mengalami peningkatan. Persentase penduduk lansia tahun 2020 meningkat menjadi 14,53 persen dari 11,17 persen dari hasil sensus penduduk sebelumnya.

Hasil SP 2020 menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin di Kabupaten secara umum tidak selalu selaras dengan level Provinsi, yaitu di Banyuwangi penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dari 15 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, terdapat 9 kecamatan dengan penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki, dinyatakan dengan rasio jenis kelamin kurang dari 100. Kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Gambiran, Glenmore, Kalibaru, Rogojampi, Blimbingsari, Singojuruh, Songgon, Glagah, Banyuwangi (BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, n.d.)

2.1.3. Kondisi Ekonomi

Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2011 pendapatan perkapita Kabupaten Banyuwangi mencapai Rp 13,6 juta kemudian meningkat pada tahun 2011 sebesar 16.7 juta per tahun, kemudian pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp 19,8 juta dan tahun 2014 mengalami peningkatan hingga Rp33,6 juta. Pergerakan ekonomi Banyuwangi yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dikontribusi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi rata-rata 34,47 persen. Sektor pertanian tidak hanya menjadi andalan Banyuwangi, namun juga sektor yang diandalkan di level Jawa Timur.

Bappeda Kabupaten Banyuwangi memaparkan bahwa angka inflasi relatif stabil pada tahun 2015 -2017. Hal tersebut diperkuat dengan adanya angka inflasi bulanan (MOM) sebagaimana pada bulan Januari-Februari 2017 inflasi Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan sebesar 0.66% pada bulan Januari dan sebesar 0.35% pada bulan Februari.

2.1.4. Kondisi Sosial dan Budaya

Pada dasarnya dalam Penyelenggaraan urusan bidang sosial di Kabupaten Banyuwangi selalu mengemban sasaran dalam meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat. Indikator yang digunakan dalam mencapai sasaran yang diemban tersebut, antara lain (1) sarana sosial seperti panti asuhan, panti

jompo dan panti rehabilitasi, (1) PMKS yang memperoleh bantuan sosial; serta (3) penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Untuk kondisi budaya masyarakat masih erat dengan kebudayaan suku setempat yaitu budaya Jawa dan Madura. Selain itu juga dapat dilihat dari fokus pengelolaan kebudayaan dengan indikator meliputi jumlah grup kesenian, jumlah geung. Dikarenakan kondisi budaya masyarakat masih erat kaitanya dengan budaya suku setempat yaitu Budaya Jawa dan Madura. Selain itu, pengelolaan dari kebudayaan dapat dilihat menggunakan indicator seperti jumlah kelompok seni, jumlah senjata dll. Berdasarkan data yang sudah diolah , pengelolaan pemuda dan olahraga meliputi jumlah klub olahraga dan gedung olahraga.

Disamping itu, jumlah kelompok seni yang mencapai 651 kelompok pada tahun 2011 meningkat menjadi 685 kelompok, pada tahun 2011. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 518 kelompok. Dan meningkat lagi menjadi 787 kelompok pada tahun 2014. Hambatan terbentuknya sistem kelompok yang lebih besar terletak pada bidang kesenian. Khususnya rendahnya keinginan masyarakat dalam melestarikan seni, seperti seni gandrung pada kalangan remaja. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi hanya memiliki satu bangunan budaya. Disamping itu, jumlah lokasi yang dikelola meningkat dari 13 situs pada tahun sebelumnya menjadi 15 situs pada tahun 2011, namun menurun menjadi 13 situs pada tahun 2013 dan 2014. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2018)

2.2. Profil Pasangan Calon Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 diikuti oleh dua pasangan calon berdasarkan SK KPU Banyuwangi nomor 364/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020, KPU Banyuwangi dengan ini mengumumkan kepada seluruh warga masyarakat bahwa nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020 telah resmi ditetapkan.

2.2.1. Profil Pasangan Yusuf Widyatmoko dan Muhammad Riza Azizy

Pasangan calon nomor urut satu yaitu Yusuf Widyatmoko dan Muhammad Riza Azizy yang diusung oleh partai politik PKB, Golkar, PKS, dan Demokrat. Sebelumnya Yusuf Widyatmoko merupakan petahana wakil bupati Kabupaten Banyuwangi yang berdampingan dengan Abdullah Azwar Anas selama dua periode untuk menjalankan roda pemerintahan yang maju, untuk ikut ajang pesta demokrasi pilkada, selain itu kiprah politik Yusuf Widyatmoko dalam partai politik adalah sebagai mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Banyuwangi meskipun saat pengusungan partai politik PDIP tidak berpihak pada pasangan ini. Sedangkan pasangannya yaitu Muhammad Riza Azizy atau lebih dikenal dengan Gus Riza adalah keluarga besar Pesantren Darussalam (Ponpes) Blokagung dan memiliki pengaruh yang kuat di Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu, Gus Riza aktif dalam Lembaga (Nahdlatul Ulama) Baik Kabupaten maupun Pusat. Penggunaan slogan menjadi salah satu alat konsolidasi massa dari dua pasangan calon, pasangan calon Yusuf-Riza menggunakan slogan “ *Makmur Bersama Wong Cilik* “ yang artinya kemakmuran tidak hanya dinikmati hanya oleh beberapa orang, maupun

golongan, tetapi makmur bersama masyarakat Banyuwangi . Berikut beberapa program-program yang tertuang dalam leaflet kampanye Yusuf-Riza, sebagai berikut :

Gambar 1.1

Program Kinerja Pasangan Yusuf-Riza



Sumber: Timesindonesia.co.id

2.2.2. Profil Pasangan Ipuk Fiestiandani dan Sugirah

Sementara pasangan Ipuk Fiestiandani dan Sugirah mendapatkan nomor urut dua, Ipuk Fiestiandani dan Sugirah diusung oleh partai nasionalis PDI Perjuangan serta beberapa partai koalisi lainnya seperti Nasdem, PPP, Hanura , Gerindra, dan beberapa partai non parlemen. Ipuk-Sugirah didukung oleh beberapa para relawannya serta tokoh agama, guru ngaji, dan kyai. Ipuk Fiestiandani atau sering dikenal “ Bu Dani “ merupakan Istri dari bupati petahana Abdullah Azwar Anas , Selain mendampingi suaminya dalam menjalankan urusan pemerintahan , Ipuk juga

terlibat dalam beberapa organisasi, antara lain Ketua Organisasi PKK Kabupaten Banyuwangi , Ketua Yayasan Kesejahteraan, dan Pembina Ikatan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan pasanganya, Sugirah dikenal sebagai petani sukses di kalangan Kabupaten Banyuwangi dan dekat dengan rakyat kecil, selain itu ia merupakan seorang politisi dari Kader partai PDIP sekaligus anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Periode 2019-2014, namun pada tahun 2020 mencalonkan dalam pilkada dengan pasanganya Ipuk Fiestiandani.

Pasangan ini mengangkat tagline “Berkesinambungan “ atau “ *Berkelanjutan*” yang mempunyai arti program-program yang sudah ada sebelumnya dapat dilanjutkan kembali sesuai dengan prinsip Kabupaten Banyuwangi , seperti diketahui Kabupaten Banyuwangi dibawah kendali Abdullah Azwar Anas mengalami pembangunan yang sangat signifikan dengan begitu harapan tagline ini akan juga dapat melanjutkan program-program yang sudah dibangun, beberapa program diantaranya tertuang dalam leaflet dibawah ini :

Gambar 2.2

Program Kinerja Pasangan Ipuk Sugirah



Sumber: Timesindonesia.co.id

2.3. Peta Politik Kabupaten Banyuwangi

Perolehan kursi politik anggota DPRD juga berdampak pada peta politik daerah, dikarenakan partai berperan di setiap posisi, artinya dalam pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi, anggota DPRD dengan partai-partainya ini masih saling berkorelasi, dimana partai-partai ini mempunyai kantong-kantong suara di setiap daerah pilihannya untuk dapat digunakan dalam mengarahkan masa kepada pasangan calon yang diusung dari partai tersebut untuk kontestasi Pilkada Kabupaten Banyuwangi.

Penjelasan terkait peta politik yang berpengaruh dalam pencalonan kepala daerah diungkapkan oleh Maftuha Kiswah selaku Wakil Ketua DPC Hanura Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut :

“...Anggota DPRD juga berkontribusi dalam Pilkada, karena mereka punya kantong-kantong suara, oleh karena itu partai politik anggota DPRD ini mempunyai kontribusi besar dalam hal *marketing politik* , dan mereka pernah berkompetisi tahun 2019 jadi punya kantong-kantong suara untuk suksesi pada Pilkada Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 untuk kemenangan dalam Pilkada, karena lembaga eksekutif juga saling berkorelasi dan membutuhkan lembaga legislatif. (wawancara dilakukan 05 november,2021 pukul 19.30 WIB)

Perolehan kursi anggota DPRD menjadi salah satu dasar penentuan peta politik Kabupaten Banyuwangi, beberapa partai politik yang melenggang di DPRD Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 tentunya mempunyai kantong- kantong suara setiap dapilnya, Berikut ini adalah Infografis Perolehan Kursi Partai Politik untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019.

Gambar 2.3
Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu DPRD
Kabupaten Banyuwangi tahun 2019



Sumber: KPU Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019

Terbukti di Kabupaten Banyuwangi partai yang berkuasa dalam perolehan suara tertinggi dalam pemilu anggota DPRD Tahun 2019 yaitu PDIP, disusul PKB, Demokrat, Golkar, Gerindra, PPP, Nasdem, Hanura dan PKS, dari partai pengusung terbanyak merapat ke Pasangan Ipuk-Sugirah dengan jumlah kursi 18, sedangkan pada pasangan calon Yusuf-Riza 11 kursi, setiap anggota DPRD mempunyai kantong-kantong suara atau massa untuk dapat diarahkan ke calon yang diusung partainya, jadi semakin banyak partai pengusung dalam perolehan kursi legislatif, maka akan semakin mempermudah dalam mobilitas massa.

Bentuk arahan seperti kampanye program dari pasangan calon yang diusung kepada masyarakat dengan tetap melalui pengawalan anggota DPRD dan Partai Pengusung. Kontestasi Pilkada sering melibatkan Partai pengusung dan Partai Pendukung, Partai pengusung calon Kepala daerah juga didasarkan pada keterwakilan kursi pada daerah dan pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah, menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa partai politik wajib memperoleh sekurang-kurangnya 10.000 kursi di legislatif atau 15% dari suara sah yang di akumulasi dari Pemilihan umum. Melalui aturan tersebut, tidak jarang jika partai politik membentuk gabungan partai politik atau koalisi dengan jumlah yang besar. Artinya partai politik dapat menjadi partai pengusung ketika adanya keterwakilan kursi dalam Pemilihan umum anggota DPRD (Peraturan Pemerintah RI, 2016).

Sedangkan partai pendukung atau partai non parlemen merupakan partai yang tidak memiliki keterwakilan kursi pada Pemilihan umum anggota DPRD yang berkoalisi dengan partai pengusung untuk mendukung calon. Namun dalam Keterlibatan Partai Pengusung dan Partai Pendukung ini mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Penjelasan mengenai tugas dan fungsi Partai Pengusung dan Partai Pendukung dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 dijelaskan oleh Khoirul Falah selaku Ketua Partai Non Parlemen dalam Pemenangan Paslon Ipuk-Sugirah, sebagai berikut :

“... Ada dua strategi dalam pengelolaan yang pertama dari partai parlemen menggerakkan secara teknis karena mempunyai massa banyak, kalau untuk partai non parlemen kita diberikan tugas untuk mengelola sosmed atau serangan udara adar lawan politik , seperti isu-isu yang dilempar dari kemudian tugas kita paling tidak bisa meminimalisir itu , jadi strategi dari medsos tugas kita yang dapat mengcounter serangan tersebut (wawancara dilakukan 03 november, pukul 10.10 WIB)

Melalui tugas dan fungsi masing-masing akan memudahkan dalam pemetaan strategi dan mobilitas massa, meskipun partai pendukung (Non Parlemen) tidak mendapatkan kursi , namun dalam hal ini partai tersebut berkoalisi dengan partai pengusung yang bersama-sama mendukung pasangan Ipuk-Sugirah, dengan begitu tugas dan fungsi yang diemban dari masing- masing partai sesuai dengan kualifikasi masing-masing partai.

Banyaknya massa dari masing-masing partai politik juga diharapkan mereka akan mendukung calon yang diajukan . Pemilihan Kepala Daerah sebagai implementasi demokrasi yang efektif dalam memberdayakan partai politik untuk mengangkat calon Kepala Daerah berdasarkan (Peraturan Pemerintah RI, 2015) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Di Bidang rekrutmen, Partai Politik sudah memainkan peran dan mencari dan menghasilkan calon pemimpin di daerah yang jujur dan dapat memenuhi kualifikasi sebagai calon Kepala Daerah melalui Pilkada.

Namun disisi lain, partai politik tidak serius dalam merekrut kader partai yang berkualitas. Pada akhirnya pemimpin parpol ragu dalam merekomendasikan calon Kepala Daerah , hal ini dikarenakan kader partai politik merekrut kader yang berpotensi tinggi untuk menang . Para kader lama tergeser oleh kader-kader baru yang dianggap memiliki tingkat elektabilitas dan kelayakan dalam memimpin tanpa perlu dilihat dari sudut pandang kemampuan dalam kepemimpinan. Praktik semacam ini seringkali melanggar substansi Pilkada sebagai wadah demokrasi dan melahirkan calon Kepala Daerah yang kredibel di mata public.

Selain itu peta politik Kabupaten Banyuwangi juga didasarkan pada penentuan daerah Pemilihan (Dapil), seperti yang dijelaskan di atas kantong- kantong suara dari DPRD terdapat dari beberapa daerah pilihannya, sehingga dapat diarahkan kepada pasangan calon yang diusung partai tersebut. Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 15 Kecamatan secara keseluruhan, untuk mempermudah pemetaan politik dan mempermudah penghitungan suara, maka Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 menggunakan daerah pilihan yang digunakan pada pemilu anggota DPRD Tahun 2019. Penjelasan mengenai penentuan daerah pemilihan dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 diungkapkan oleh I Made Cahyana Negara selaku Ketua Partai PDIP DPC Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

“...Seperti pengaturan dapil, kalau untuk Pilkada tidak ada aturan penetapan dapil, namun karena dalam Pilkada itu melibatkan partai politik juga , ya untuk mempermudah dalam pemetaan politik kita pakai acuan Dapil yang digunakan pada Pemilu Tahun 2019, dengan ini juga mempermudah dalam penghitungan suara dari setiap dapilnya (wawancara dilakukan 04 november, pukul 14.55 WIB)

Oleh karena itu, Daerah Pemilihan Kabupaten Banyuwangi dalam Pilkada Tahun 2020 menggunakan dapil pemilu 2019 dengan jumlah dapil V (lima) dengan masing-masing dapil terdiri dari beberapa kecamatan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Dapil Pemilu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019

Nama Dapil	Wilayah Dapil
Dapil I	Banyuwangi, Giri, Glagah, Kalipuro, Licin, Wongsorejo
Dapil II	Blimbingsari, Kabat, Rogojampi, Singojuruh, dan Songgon
Dapil III	Cluring, Muncar, Srono dan Tegaldlimo
Dapil IV	Bangorejo, Gambiran, Pesanggaran, Purwoharjo, Siliragung, Tegalsari
Dapil V	Genteng, Glenmore, Kalibaru dan Sempu

Sumber : Lingkaran Survey Indonesia (Detik.com)

2.4. Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020

Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2020 berbeda dari tahun sebelumnya, dikarenakan untuk pertama kalinya Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan di tengah wabah Covid-19 . Terkait dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19. Sebelumnya Pilkada akan diselenggarakan pada 19 September Tahun 2020, namun diundur sampai tanggal 09 desember 2020. Banyak

pertimbangan jika Pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemic, namun jika pelaksanaan Pilkada mundur maka akan mengganggu stabilitas pemerintahan dan stabilitas demokrasi. Buruknya kualitas Pilkada, dan keterwakilan masyarakat yang tidak maksimal , ditambah dengan peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi virus Covid-19, belum optimal. Namun, Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 tetap dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020, berdasarkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.

Pada akhirnya, Pemerintah berkeyakinan bahwa Pilkada ini harus tetap dilaksanakan dengan mempersiapkan dan dilaksanakan sesuai Protokol Kesehatan Covid-19 dengan melaksanakan sosialisasi PKPU No 10 Tahun 2020. Selain itu, aturan tersebut merinci Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di semua tahapan Pemilihan , termasuk kegiatan tatap muka , bimbingan teknis, sosialisasi, kampanye, pemungutan suara , dan penghitungan suara. Namun hal tersebut nyatanya tetap menjadi kendala bagi pendukung dari tim pemenangan kandidat, keterbatasan media kampanye yang tidak bisa melibatkan banyak masa di era pandemi ini menjadi kendala utama untuk merebut suara rakyat dalam jumlah yang banyak. Penjelasan ini diungkapkan oleh I Made Cahyana negara selaku Ketua Tim Sukses Ipuk-Sugirah sebagai berikut:

“...Pilkada tahun 2020 kemarin kan memang beda dari tahun sebelumnya baik teknis maupun non teknis karena dilakukan pada saat pandemic, sehingga tahapannya ya agak sedikit berbeda karena harus ada beberapa hal yang dilakukan dengan cara pembatasan, misalnya melakukan kumpul-kumpul tidak boleh lebih dari lima puluh orang seperti kekhawatiran masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, akan tetapi proses seperti ini kan harus tetap dilakukan, namun masih bisa di minimalisir wawancara dilakukan (04 november, pukul 14.55 WIB)

Namun proses Pilkada di tengah Pandemi, tidak hanya berlarut-larut memberikan dampak negatif dan kekhawatiran public, namun juga memberikan dampak positif seperti. Penggunaan aplikasi teknologi di dunia maya menggunakan cara lama dengan menggantikan jumlah orang yang cukup banyak. Calon Kepala Daerah perlu membiasakan diri dengan cara ini. Pandemi Covid-19 ini dapat dijadikan sebagai pendorong untuk kampanye dengan metode baru melalui cara yang aman, dan santai. Tidak hanya itu, melalui Pilkada era pandemic ini peserta juga dituntut untuk mengembangkan teknologi secara inovatif dan menarik perhatian public.

Oleh karena itu untuk tetap mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Kabupaten Banyuwangi dengan patuh dan taat protocol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran Covid-19, dengan tetap menerapkan 3M (penggunaan masker, cuci tangan, menjaga jarak) selain itu ada batasan jumlah peserta yang berpartisipasi selama kegiatan kampanye. Sesuai dengan aturan, jumlah peserta kampanye tidak boleh lebih dari 50 orang .

Penguatan disiplin protocol kesehatan sangat penting mengingat kampanye memungkinkan masyarakat untuk saling berinteraksi secara langsung, dikarenakan kampanye memang berada pada tahapan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, sehingga penanganannya juga harus ketat dan sesuai aturan. Hal ini menjadi tantangan besar terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemic Covid-19, sehingga sering terjadi pelanggaran mengenai protocol kesehatan yang menyangkut pada persaingan politik antar kedua calon. Dalam upaya pesta demokrasi tahun 2020, diharapkan masyarakat dapat menjaga protocol kesehatan dengan aman dan lancar, sehingga Pilkada serentak tahun 2020 dapat berjalan sesuai harapan. Serta dalam penyelenggaraan Pilkada. Melalui peran aktif masyarakat dan pengawas Pilkada , maka Pilkada serentak Tahun 2020 dapat berjalan aman dan sesuai harapan

